BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

2.1.1 Sejarah Perusahaan

Awal kelistrikan di bumi parahyangan sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda bercokol di tataran tanah Sunda. Pada tahun 1905 di Jawa Barat khususnya Kota Bandung berdiri perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan publik milik Pemerintah Kolonial Belanda yang bernama *Bandoengsche Electriciteit Maatschappij* (BEM). Dalam perjalanannya, tanggal 1 Januari 1920 BEM berubah menjadi perusahaan perseroan dengan nama *Gemeenschpplijk Electriciteit Bedrif Voor Bandoeng* (GEBEO). Penggantian ini dikukuhkan dengan akte pendirian Notaris Mr.Andriaan Hendrik Van Ophusein dengan Nomor: 213 pada tanggal 31 Desember 1949.

Ketika pemerintahan Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia antara rentang waktu 1942-1945 terjadi perubahan kembali terhadap perusahaan perseroan yang ditetapkan oleh kolonial Belanda ini. Pada saat itu, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Jepang yang bernama *Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha* dengan Wilayah kerja seluruh pulau Jawa.

Pemerintah Indonesia baru benar-benar mengawali pengelolaan penyediaan tenaga listrik di seluruh tanah air yang ditanganinya langsung setelah Kemerdekaan RI, tepatnya pada tahun 1957. Salah satunya ditandai dengan

pengambilalihan GEBEO oleh Pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1957 yang kemudian dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 1958 j.o. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1959.

Pada tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN melalui Peraturan Pemerintah No.67. Sejalan dengan itu, PLN Bandung pun berubah menjadi PLN Exploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat, di luar DKI Jaya dan Tangerang.

Pada tahun 1970-an, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara yang menjelaskan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Mengacu pada pengumuman PLN Eksploitasi No.05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Badan Hukum PLN mengalami perubahan kembali dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) setelah adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994. Perubahan itu turut mengubah nama Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994. Untuk memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, maka keluarlah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari

2001 yang menjadi landasan hukum perubahan nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diubah menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

Wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat tidak hanya menjangkau Jawa Barat saja, tetapi juga Propinsi Banten, maka melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 120.K/010/DIP/2002 tanggal 27 Agustus 2002, PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat berubah lagi namanya menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten hingga saat ini yang masih menempati bangunan lawas bernilai sejarah yang beralamat di JL. Asia Afrika No.63 Bandung.

2.1.2 Visi, Misi dan Motto Perusahaan

Visi

Diakui sebagai Perusahaan kelas dunia yang bertumbuh-kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

Misi

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Motto

PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten memiliki motto dalam melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan kelistrikan, yaitu "*Electricity For A Better Life*" atau Listrik Untuk Kehidupan yang Lebih Baik. Untuk mewujudkan visi misi perusahaan, PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten mengembangkan wawasan bersama sebagai panduan dalam bekerja dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yang terdiri dari rasa Saling Percaya, Integritas, Peduli, dan Pembelajar.

2.1.3 Logo Perusahaan



Gambar 2.1

Logo Perusahaan

PT PLN (Persero) memiliki logo yang terdiri dari tiga elemen:

- Bidang Persegi Panjang Vertikal

  Menjadi bidang dasar bagi elemen lainnya melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PT PLN (Persero) bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan bermasyarakat, selain itu warna kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

- Petir atau Kilat

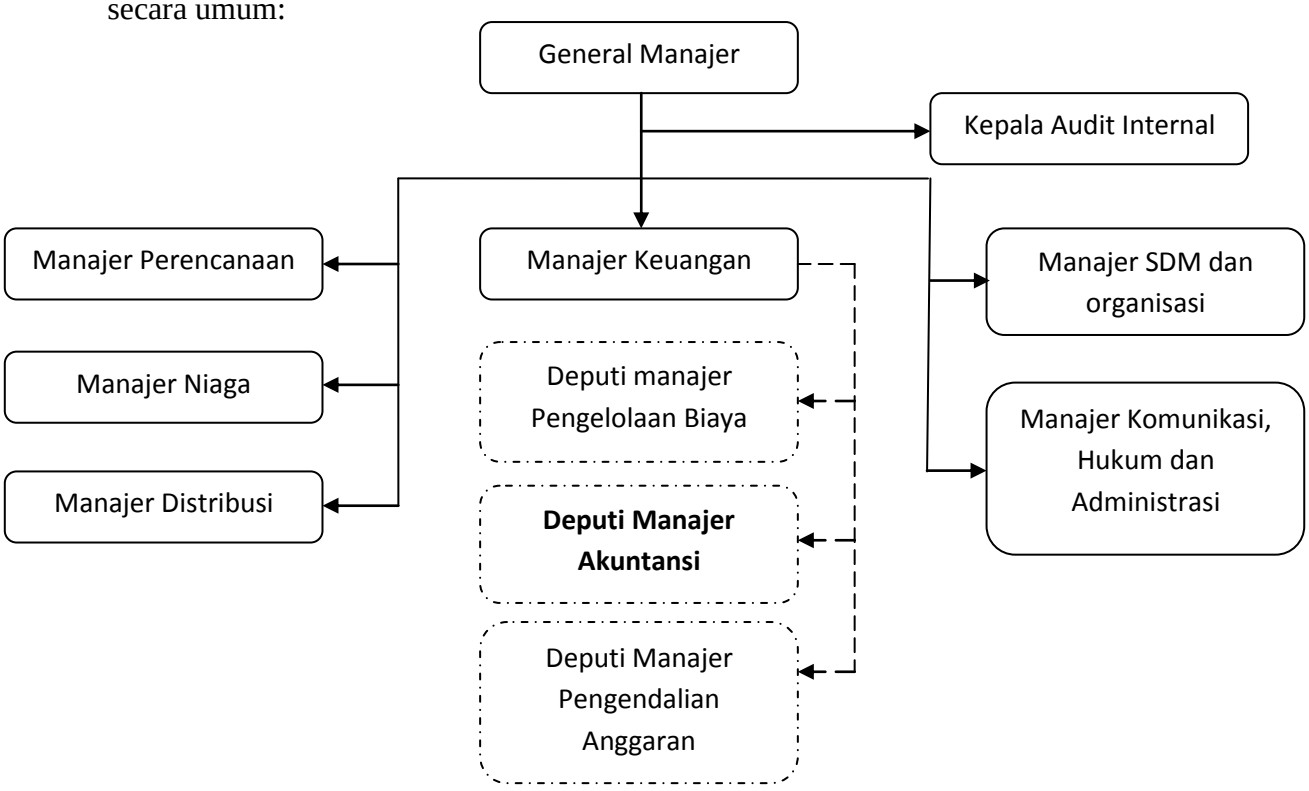
  Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, petir pun melambangkan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warna merah melambangkan kedewasaan PT PLN (Persero) sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan bersama tiap insane perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.

- Tiga Gelombang

  Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dilahirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi utama yang seiring dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan seterti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu, biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

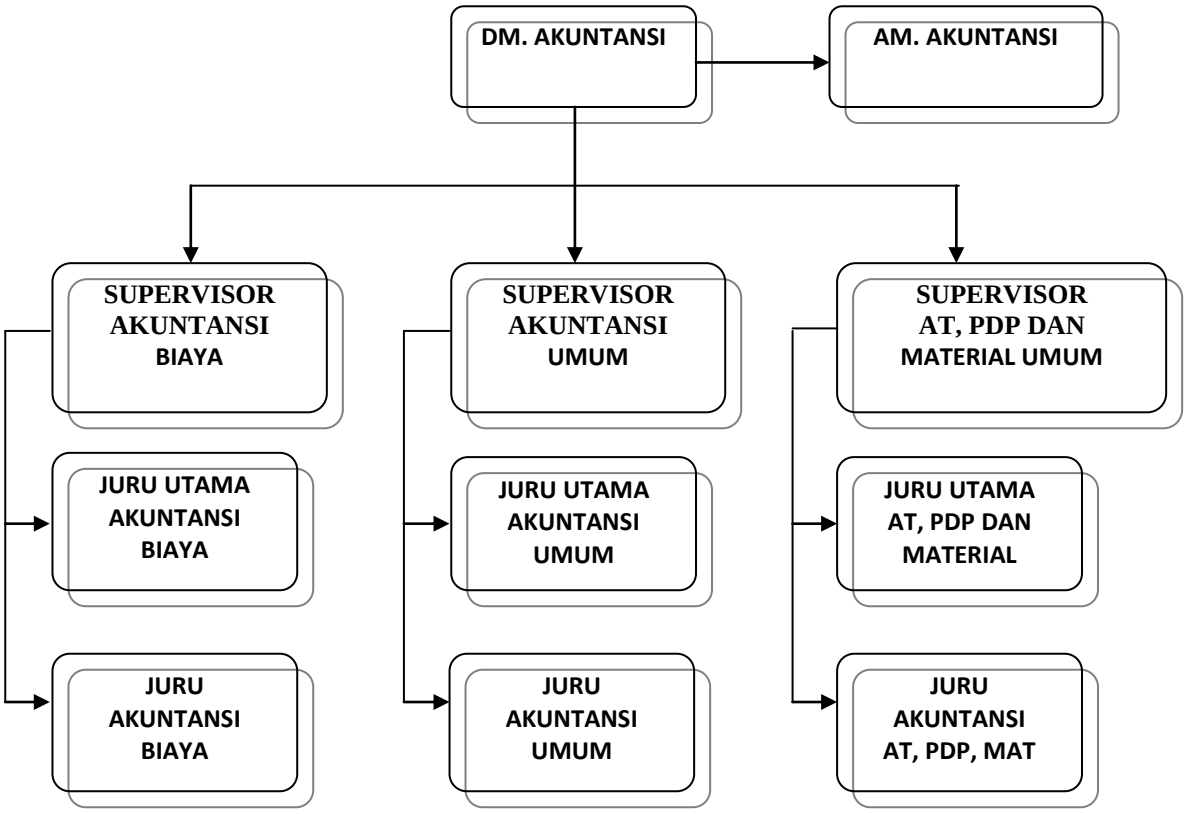
Struktur organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten secara umum:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Dilihat dari struktur organisasi di atas, Manajer Keuangan membawahi Deputi Manajer Pengelolaan Biaya, Deputi Manajer Pengendalian Anggaran dan Deputi Manajer Akuntansi. Adapun Struktur Organisasi pada Bagian Akuntansi di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten secara khususnya sebagai berikut:



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bagian Akuntansi

Sumber : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

Secara struktural bagian ini dipimpin oleh seorang Deputi Manajer sistem akuntansi. Adapun deskripsi jabatan berdasarkan struktur organisasi di atas, yaitu:

1. Deputi Manager Akuntansi

Deputi Manager Akuntansi bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan akuntansi. Tugas yang dilakukan oleh Deputi Manager Akuntansi adalah melaksanakan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan mecakup bidang – bidang penyusunan anggaran yang menggunakan metodologi dan data yang akurat, pembelanjaan dan pengendalian keuangan; baik konstruksi maupun pengusahaan, tata usaha langganan, sistem pelaporan dan akuntansi juga membuat laporan dalam bidangnya.

2. AM Akuntansi (Ahli Madya Akuntansi)

AM Akuntansi berperan sebagai penasihat Deputi Manager Akuntansi dan pengawas dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di akuntansi. Adapun tugas AM Akuntansi adalah sebagai berikut:

a Menerima LP (Laporan Pemeliharaan dan KL (Laporan Keuangan)

b Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, Rekening Listrik Kas dan bank sampai pembuatan pendataan.

c Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan.

3. Supervisor Akuntansi Biaya

Supervisor Akuntansi Biaya merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap biaya operasi. Tugas-tugasnya antara lain:

a. Menerima LHP Internal Auditor, Akuntan Publik dan SPI serta memverifikasi, memonitor serta menerima Surat Tanggapan Cabang atas LHP Internal Auditor, Akuntan Publik dan SPI untuk selanjutnya dilaporkan ke Deputy Manajer Akuntansi (DMAK).
b. Menerima LP dan LK dari cabang – cabang serta mendistribusikan LP dan LK Cabang keseluruh Staf Akuntansi untuk verifikasi dan memonitor dan menerima hasil verifikasi dari Staf Akuntansi untuk selanjutnya dikirim ke cabang/unit.
c. Melaksanakan inventarisasi Fisik Material, AT dan PDP, rekening listrik, Kas dan Bank sampai pembuatan dan penandatanganan BA.
d. Melaksanakan tugas lainya sesuai perintah dari atasan.

4. Supervisor Akuntansi Umum

Supervisor Akuntansi Umum merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap akuntansi umum seperti piutang, utang, dll. Tugas-tugasnya antara lain:

a. Mengevaluasi dan verifikasi J-01 dan J-02.
b. Mengevaluasi dan verifikasi nota dinas masuk dan nota dinas keluar, ke wilayah atau distribusi lain.
c. Mengevaluasi dan verikasi hasil rekonsiliasi utang pajak, J-24, piutang pegawai, piutang rekening ristrik, bank, dana pensiun, YPK.

d. Mengevaluasi dan verifikasi pembuatan LP KD bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
e. Melaksanakan inventarisasi Fisik Material, AT dan PDP, rekening listrik, Kas dan Bank sampai pembuatan dan penandatanganan BA.
f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan.

5. Supervisor Akuntansi AT (Aktiva Tetap), PDP (Pekerjaan Dalam Pelaksanaan) dan Material

Supervisor Akuntansi AT (Aktiva Tetap, PDP (Pekerjaan Dalam Pelaksanaan) dan Material merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap AT, PDP dan Material. Tugas-tugasnya antara lain:

a. Menerima laporan cabang – cabang untuk selanjutnya didistribusikan ke Staf Akuntansi AT dan PDP untuk diproses lebih lanjut.
b. Menerima hasil verifikasi dari Staf Akuntansi AT dan PDP mengenai Daftar B, C, D, E, F, DPAT dan PMAT.
c. Meneliti usulan relokasi/penghapusan dari cabang (AE 1 + 1.1) diteruskan ke Staf Akuntansi AT dan PDP untuk dibuat dan diverifikasi usulan relokasinya (AE 2.2.1 dan AE 3.3.1).
d. Melaksanakan inventarisasi Fisik Material, AT dan PDP, rekening listrik, Kas dan Bank sampai pembuatan dan penandatanganan BA.
e. Membuat Laporan Hasil Inventarisasi.
f. Melaksanakan tugas lainya sesuai perintah atasan.

6. Juru Utama Akuntansi Biaya

Juru Utama Akuntansi Biaya adalah orang yang mengelola laporan-laporan mengenai biaya yang dikeluarkan. Tugas-tugasnya antara lain:

a. Memonitor piutang rekening listrik serta mencocokan data akuntansi dengan data bagian niaga, cabang dengan GL Magic untuk selanjutnya digabung sebagai bahan menyusun Laporan Keuangan (LK) Unit Bisnis Distribusi (UBD) Jawa Barat dan Banten.
b. Memonitor Biaya Penyambungan (BP).
c. Memonitor uang jaminan langganan.
d. Verifikasi LP dan LK cabang serta melaporkan hasil verikasi kepada Supervisor Akuntansi Biaya.
e. Melaksanakan inventarisasi Fisik Material, AT dan PDP, rekening listrik, Kas dan Bank sampai pembuatan dan penandatanganan BA.
f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan.

7. Juru Utama Akuntansi Umum

Juru Utama Akuntansi Umum adalah orang yang mengelola laporan-laporan mengenai akuntansi umum seperti piutang, utang, dll. Tugas-tugasnya antara lain:

a. Mengentri transaksi kas/bank.
b. Pembentukan nota hasil entry, selanjutnya mengcopy ke disket lalu diserahkan kepada Juru Akuntansi Umum untuk dibuatkan nota ke cabang/wilayah.

c. Membuat laporan listrik pedesaan untuk selanjutnya dilaporkan ke PT. PLN (Persero) pusat.
d. Membuat laporan pemeliharaan (HR/HK) untuk selanjutnya dilaporkan ke PT. PLN (Persero) pusat.
e. Verifikasi LP dan LK cabang serta melaporkan hasil verifikasi kepada Supervisor Akuntansi Umum.
f. Melaksanakan inventarisasi Fisik Material, AT dan PDP, rekening listrik, Kas dan Bank sampai pembuatan dan penandatanganan BA.
g. Melaksanakan tugas lainya sesuai dengan perintah dari atasan.

8. Juru Utama Akuntansi AT (Aktiva Tetap), PDP (Pekerjaan Dalam Pelaksanaan) dan Material

Juru Utama Akuntansi AT (Aktiva Tetap), PDP (Pekerjaan Dalam Pelaksanaan) dan Material adalah orang yang mengelola laporan-laporan mengenai AT, PDP dan Material yang ada. Tugas-tugasnya antara lain:

a. Membuat laporan aktiva tetap dengan menginput dan memverifikasi lalu diproses kedalam aplikasi AT – DTE.
b. Memonitor laporan Daftar F setelah dicocokan dengan LP, PMAT dan DPAT selanjutnya hasilnya dilaporkan.
c. Memverifikasi LP dan LK cabang serta melaporkan hasil verifikasi ke Supervisor Akuntansi AT dan PDP.
d. Melaksanakan inventarisasi Fisik Material, AT dan PDP, Rekening Listrik, Kas dan Bank sampai pembuatan dan penandatanganan Berita Acara (BA).

e. Melaksanakan tugas lainya sesuai perintah dari atasan.

9. Juru Akuntansi Biaya

Juru Akuntansi Biaya adalah orang yang mengerjakan laporan-laporan mengenai biaya yang dikeluarkan. Tugas-tugasnya antara lain:

a. Membantu tugas-tugas Juru Utama Akuntansi Biaya.

b. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan.

10. Juru Akuntansi Umum

Juru Akuntansi Umum adalah orang yang mengerjakan laporan-laporan mengenai akuntansi umum seperti piutang, utang, dll. Tugas-tugasnya antara lain:

a. Membantu tugas-tugas Juru Akuntansi Umum.

b. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan.

11. Juru Akuntansi AT (Aktiva Tetap), PDP (Pekerjaan Dalam Pelaksanaan) dan Material

Juru Akuntansi AT (Aktiva Tetap), PDP (Pekerjaan Dalam Pelaksanaan) dan Material adalah orang yang mengerjakan laporan-laporan mengenai AT, PDP dan Material yang ada. Tugas-tugasnya antara lain:

a. Membantu tugas-tugas Juru Akuntansi AT, PDP dan Material.

b. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan.

2.4 Kegiatan Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tanggal 28 Mei 1990 pasal 5 ayat 1, bidang usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah memberikan pelayanan jasa listrik kepada masyarakat disamping memperoleh laba, dan dijelaskan bahwa sifat usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten ini adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip akuntansi.

Maksud didirikannya PT PLN (Persero) adalah untuk mengusahakan, menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang memadai dengan tujuan:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
2. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
4. Penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan masyarakat.

Lapangan usaha PT PLN (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tanggal 28 Mei 1998 pasal 6 adalah sebagai berikut:

"Dengan mengindahkan prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan negara, PT PLN (Persero) menyediakan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan pembangunan tenaga listrik".

Dalam mengembangkan usahanya PT PLN (Persero) melakukan perencanaan dan pembangunan penyediaan tenaga listrik dengan persetujuan

Menteri Pertambangan dan Energi PT PLN (Persero). Dalam mengusahakan tenaga listrik, PT (Persero) PLN mempunyai 3 sasaran yaitu:

a. Meningkatkan jumlah pelanggan
b. Meningkatkan daya terpasang
c. Meningkatkan jumlah kWh kepada pelanggan

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah satuan administrasi yang tidak memiliki fasilitas pembangkit dan transmisi. Unit ini membeli energinya dari unit PLN lainnya yang diterima di Gardu Induk (GI). Seluruh pulau Jawa yang menyerap hampir 80% volume penjualan tenaga listrik seluruh Indonesia dikelola oleh empat PLN distribusi yang berfungsi sebagai unit koordinatif. Salah satu distribusi tersebut adalah PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Jawa Barat dan Banten.

Luas wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten (PLN DJBB) menjangkau lebih dari 42.196 km² yang meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten, kecuali Tangerang. Wilayah dan beban kerja yang sedemikian besarnya, dikelola oleh Unit-unit Pelaksana Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) dan Area Pengatur Distribusi (APD), dengan komposisi sebagai berikut :

- Area Pelayanan Jaringan (APJ) : 16 Unit
- Area Pengatur Distribusi (APD) : 1 Unit
- Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) : 90 Unit
- Unit Pelayanan dan Jaringan Prima (UPJ Prima) : 7 Unit

- Kantor Pelayanan (KP) : 191 KP

Adapun Unit-unit Pelaksana tersebut adalah

1. APD Bandung
2. APJ Bandung
3. APJ Banten Utara
4. APJ Banten Selatan
5. APJ Bekasi
6. APJ Bogor
7. APJ Cianjur
8. APJ Cimahi
9. APJ Cirebon
10. APJ Depok
11. APJ Garut
12. APJ Karawang
13. APJ Majalaya
14. APJ Purwakarta
15. APJ Sukabumi
16. APJ Sumedang
17. APJ Tasikmalaya

Fungsi masing-masing cabang tersebut adalah untuk mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen, membangun jaringan distribusi, pelayanan langganan dengan sistem pembendaharaan serta melaporkan kegiatannya dengan membuat laporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Tenaga listrik yang disalurkan kepada konsumen adalah tenaga listrik yang dibangkitkan dari beberapa pusat tenaga listrik yang ada di Jawa Barat, dari pusat tenaga listrik tersebut ditransmisikan lagi ke gardu-gardu induk, kemudian ditransmisikan lagi ke gardu-gardu cabang dan akhirnya sampai kepada konsumen.

2.4.1 Tujuan dan Strategi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Tujuan dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pengatur Distribusi adalah mampu memberikan kepuasan kepada tiga pemeran utama perusahaan yaitu pelanggan, karyawan dan pemegang saham. Dalam pencapaian sasaran kinerja yang disepakati dengan cara memberdayakan unit-unit kerja yang berhubungan langsung dengan pelanggan.

Strategi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pengatur Distribusi Bandung adalah mengoptimalkan sumber daya perusahaan yang berada dalam kendali manajemen dengan harapan segera memberikan peningkatan kinerja perusahaan, disertai dengan melaksanakan rencana restrukturisasi perusahaan secara efisien.

2.4.2 Fungsi dan Peranan PT.PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten

Fungsi dan peranan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan sistem distribusi tenaga listrik agar proses penyaluran tenaga listrik dari sumber tenaga sampai ke konsumen dapat berjalan lancar, aman dan handal dengan mutu tegangan yang baik dan dalam batas frekuensi yang diijinkan.

2.4.3 Produk Perusahaan

Produk yang dihasikan dan dijual oleh PT. PLN (Persero) adalah energi listrik yang bisa dipergunakan untuk menjalankan mesin dan penerangan. Berdasarkan tujuan pemakaian listrik, maka energi listrik yang dihasilkan dan dijual kepada pelanggan dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu :

- Golongan tarif S = Kepentingan Sosial
- Golongan tarif R = Rumah Tangga
- Golongan tarif B = Bisnis
- Golongan tarif I = Industri
- Golongan tarif P = Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum

Berdasarkan Kepres No. 83 tahun 2001, ditambahkan golongan tarif baru, yaitu :

- Golongan tarif T = Traksi/Kereta Listrik
- Golongan tarif C = Curah, untuk keperluan khusus

- Golongan tarif M = Multiguna

Golongan tarif ini diperuntukan bagi pengguna tenaga listrik dengan persyaratan khusus atau spesifik, serta memberi nilai tambah bagi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten maupun bagi pelanggan. Transaksi multiguna sangat menguntungkan karena dibuat berdasarkan kesepakatan perjanjian tersendiri. Jenis transaksi multiguna ini terdiri dari :

- Transaksi Energi Listrik (TEL), meliputi multiguna ekspor; impor; musiman; prabayar; beban dapat diatur; listrik hari libur.
- Transaksi Non Energi Listrik, yaitu penyediaan tingkat keandalan layanan, penyediaan fasilitas ketenagalistrikan dan penyediaan layanan jasa kelistrikan.